

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan melalui MSDM di bidang pendidikan nasional dan ini merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002, dan lebih terfokus lagi, setelah diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 Bab 2 pasal 3 adalah “Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak MSDM serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap pemerintah” (Sisdiknas 2003: 05).

Di tengah persaingan dalam MSDM era kesemrawutan global dan pasar bebas manusia dihadapkan pada perubahan-perubahan yang tidak menentu. Ibarat “nelayan di laut lepas” yang dapat menyesatkan jika tidak memiliki “kompas” sebagai pedoman untuk bertindak dan mengarunginya, maka kondisi tersebut telah mengakibatkan hubungan yang tidak linear antara pendidikan dengan dunia kerja atau “*one to one*

relationship”, karena apa yang terjadi dalam lapangan kerja sulit diikuti oleh pendidikan, sehingga terjadi kesenjangan social melalui MSDM.

Menyadari hal tersebut, MSDM pemerintah telah melakukan penyempurnaan sistem pendidikan, baik melalui penataan perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware). Upaya tersebut, antara lain dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, serta diikuti oleh penyempurnaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan melalui MSDM. Jika sebelumnya wewenang pendidikan merupakan wewenang pusat dengan paradigma *top-down* atau sentralistik, maka dengan berlakunya Undang-Undang tersebut kewenangan bergeser kepada pemerintah daerah kota dan kabupaten melalui MSDM dengan paradigma *bottom-up* atau desentralistik, dalam wujud pemberdayaan sekolah, yang meyakini bahwa untuk meningkatkan MSDM, maka kualitas pendidikan sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang berada digaris depan, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan, dan terkena akibatnya secara langsung, yakni guru dan kepala sekolah.

Dalam kaitan ini visi, misi, dan strategi Dinas Pendidikan Nasional pada tingkat kabupaten dan kota melalui MSDM harus mempertimbangkan dengan bijaksana dan kondisi nyata sekolah dan masyarakat, dah harus pula mendukung kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah, serta ini harus mampu memelihara garis kebijakan dari birokrasi yang lebih tinggi. Di

samping itu, tujuan harus layak dan dapat dicapai dengan kemampuan yang ada, serta memiliki gambaran yang ideal tentang kondisi pendidikan di SMP Negeri 2 Lakudo yang diharapkan di masa depan oleh masyarakat setempat.

Untuk kepentingan tersebut diperlukan paradigam baru manajemen pendidikan. Dalam hal ini, berbagai pihak menganalisis MSDM dan melihat perlunya diterapkan berbasis sekolah (*school based management*), yang dapat mengelola pendidikan sesuai dengan tuntunan reformasi dalam era globalisasi.

Manajemen MSDM di sekolah ini merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MSDM merupakan paradigma baru manajemen pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada sekolah, dan melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional yang diberikan agar sekolah leluasa mengelola MSDM yaitu sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, disekolah serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.

MSDM adalah suatu ide tentang pengambang keputusan pendidikan yang diletakan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan ilmu yang lebih besar, di samping menunjukan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan

masyarakat juga merupakan sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemeratan pendidikan.

MSDM merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan wewenang kepada sekolah untuk mengantar kehidupan sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhannya. Otonomi dalam manajemen MSDM merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para tenaga kependidikan, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, dan meningkat pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Pada sistem MSDM, sekolah memiliki "*full authority and responsibility*" dalam menetapkan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan tersebut, sekolah dituntut untuk menetapkan berbagai program dan kegiatan, menentukan prioritas, mengendalikan pemberdayaan berbagai potensi sekolah dan lingkungan sekitar, serta mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam sistem MSDM, semua kebijakan dan program sekolah ditetapkan oleh Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Badan ini merupakan lembaga yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dari pejabat daerah setempat, komisi pendidikan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, tenaga kependidikan, perwakilan orang tua peserta didik, dan tokoh masyarakat. Lembaga inilah yang menetapkan segala kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pendidikan yang berlaku. Selanjutnya, komite sekolah perlu

merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan berbagai implikasinya terhadap program-program kegiatan operasional untuk mencapai tujuan sekolah.

Dalam konsepnya, MSDM meliputi lingkup strategi: (a) Kurikulum yang bersifat inklusif, (b) Proses belajar mengajar yang efektif, (c) Lingkungan sekolah yang mendukung, (d) Sumber daya manusia yang berasas pemerataan, dan (e) Standarisasi dalam hal-hal tertentu, monitoring evaluasi dan tes. Kelima strategi tersebut harus menyatu dalam empat lingkup fungsi pengelolaan sekolah, yaitu: (1) Manajemen/Organisasi/Kepemimpinan, (2) Proses belajar mengajar, (3) Sumber daya manusia, (4) Administrasi sekolah (Jalal, 2001: 160). Sedangkan keempat fungsi pengelolaan sekolah tersebut menunjuk pada Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Dengan demikian MSDM di tingkat sekolah merupakan aspek yang sangat penting, karena sekolah adalah institusi yang memegang peranan kunci dalam menentukan mutu pendidikan.

MSDM di sekolah menuntut kemampuan profesional kepala sekolah, sebagai pelaku utama dalam mengelola secara efektif MSDM yang ada terutama guru. Hal ini dikarenakan kepala sekolah sebagai manajer sekaligus Pembina, adalah orang yang paling banyak memiliki waktu untuk berinteraksi dengan guru (Tilaar, 2002: 176). Guru sendiri merupakan sentral dari upaya peningkatan mutu pendidikan, karena itu setiap upaya meningkatkan mutu pendidikan harus melibatkan penataan dan pembenahan terhadap guru. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) harus mampu meningkatkan

profesionalisme guru. Guru yang professional memiliki dedikasi dan komitmen yang kuat terhadap kemajuan dunia pendidikan, khususnya peserta didik. Untuk pengabdianya tersebut, guru/ SDM yang professional mendapatkan imbalan yang layak sesuai dengan tugas professionalnya. Dengan kata lain, guru/ SDM yang mengikuti prinsip professionalism, yaitu “terdidik dengan baik, terlatih dengan baik dan dihargai dengan layak” (*well-educated, well-trained, well-paid*) (Jalal, 2001: 226).

Akan tetapi professionalism guru di Indonesia dewasa ini dinilai masih rendah. Dalam dunia global sekarang ini masih banyak guru yang kurang wawasan dan tertinggal pengetahuan, akibatnya kadar profesionalnya menjadi terbatas (Ki Supriyoko, 2000). Lebih dari itu, sekarang banyak guru yang terjangkit perasaan ketidakberdayaan (*inferiority feeling*), akibat mereka kurang sanggup mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Sebagai lanjutannya tidak sedikit para guru yang dihinggapi oleh perasaan rendah diri yang berlebihan (*meerwardigheid complex*). Akibatnya mereka tidak dapat menjalankan fungsinya secara professional. Dengan kondisi seperti ini, akan sulit dihasilkan produk-produk pendidikan yang bermutu tinggi (Ki Suproyoko, 2000).

Dari segi kesejahteraan, guru di Indonesia pada umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang tergolong rendah. Hal tersebut tidak sesuai dengan pengabdian yang diberikannya. Padahal kesejahteraan guru yang rendah berdampak tidak menguntungkan terhadap motivasi guru, status social profesi keguruan, dan dunia pendidikan secara keseluruhan (Jalal, 2001: 229).

Pelaksanaan MSDM yang efektif akan meningkatkan profesionalisme guru, dimulai dengan proses perencanaan SMD, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, sampai kompensasi yang tepat akan menciptakan guru yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Pada gilirannya akan meningkatkan mutu out put.

Di SMP Negeri 2 Lakudo untuk manajemen sumber daya manusia (MSDM) telah mengupayakan pelatihan-pelatihan diantaranya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), cara pembuatan modul mata pelajaran, moving kelas, dan metode-metode pembelajaran. Guru 25 % belum mahir mengoperasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah difasilitasi oleh sekolah. Dari segi komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris yang lancar dan fasih hanya 15 % dari 15 orang guru yang ada.

Mulai tahun ajaran 2010 / 2011 menerima rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN), sebagai bahasa pengantar di kelas tersebut harus menggunakan 50 % bahasa Inggris dan 50 % bahasa Indonesia, dan guru harus menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk praktek siswa ada 1 Laboratorium yang dimiliki, Laboratorium IPA dan Laboratorium Komputer. Laboratorium IPA dipergunakan oleh mata pelajaran Fisika, Kimia dan Biologi, idealnya setiap satu mata pelajaran satu Laboratorium, masih kurang 2 Laboratorium yang harus dimiliki. Laboratorium computer digunakan oleh seluruh siswa dari kelas 7, 8, dan kelas 9 dengan jumlah computer sebanyak 2 buah. Selaian Laboratorium IPA dan Komputer, juga

ada Laboratoium Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk kegiatan keagamaan sehari-hari anak di sekolah yaitu sebuah masjid yang berdiri di dekat gerbang sekolah. Untuk menambah wawasan dan sumber belajar anak tersedia perpustakaan yang representatif yang sudah dilengkapi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Berdasarkan latar belakang yang demikian, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang manajemen peningkatan mutu sumber daya manusia di SMP Negeri 2 Lakudo.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi MSDM di SMP Negeri 2 Lakudo?
2. Bagaimana tanggapan guru terhadap MSDM di SMP Negeri 2 Lakudo?
3. Bagaimana tanggapan Siswa terhadap MSDM di SMP Negeri 2 Lakudo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Strategi MSDM di SMP Negeri 2 Lakudo.
2. Tanggapan guru terhadap MSDM di SMP Negeri 2 Lakudo.
3. Tanggapan Siswa terhadap MSDM di SMP Negeri 2 Lakudo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentang sistem manajemen sumber daya manusia yang digunakan oleh SMP Negeri 2 Lakudo.
2. Menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain terutama yang berkenaan dengan manajemen peningkatan mutu sumber daya manusia.